



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT INTERN
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DPR RI**

Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	IV
Rapat Ke	:	1
Jenis Rapat	:	RDPU
Sifat Rapat	:	Terbuka.
Hari, Tanggal	:	Rabu, 17 Juni 2020
Waktu	:	10.20 WIB – 12.30 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat BAKN
Acara	:	Pembahasan Mendapat masukan terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Subsidi Energi Listrik, BBM dan Gas
Ketua Rapat	:	Ahmad Syaikhu
Sekretaris Rapat	:	Mardi Harjo, S.E., M.Si.
Hadir Anggota	:	ANGGOTA BAKN DPR RI F-PKS (Ahmad Syaikhu) F-P. Demokrat (Marwan Cik Asan) F-P. Golkar (H.M Misbakhun, SE., M.H) F-PDIP (I Gusti Agung Rai Wirajaya, SE, MM) F-PKB (H. Bachrudin Nasori, S.SI, M.M) F-P. NASDEM (Sugeng Suparwoto)

JALANNYA RAPAT:
F-PKS (AHMAD SYAIKHU):

Bissmillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.

Yang Terhormat saudara Faisal Basri, S.E., M.A.,
Yang Terhormat saudari Dr. Enny Sri Hartati,
Yang Terhormat saudari Dr. Ir. Ratnayu Sitaresmi, M.T.,
Juga para anggota BAKN yang saya hormati saya banggakan.

Alhamdulillah puji syukur mari kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang atas izinnya dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa melaksanakan RDPU secara fisik dan sebagian secara virtual.

Perlu saya sampaikan bahwa menurut peraturan tata tertib No. 1 tahun 2020 yang disebutkan dalam Pasal 254 ayat 4 semua jenis rapat DPR dihadiri oleh anggota kecuali dalam keadaan tertentu yakni keadaan bahaya, kepentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional, rapat dapat dilaksanakan secara virtual dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah sudah terhubung juga bersama kita Pak Agung Wakil Ketua, eh belum ya?

Dan ayat 5 disebutkan dalam hal jenis rapat DPR dilaksanakan secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat 4 kehadiran anggota dapat ditetapkan sebanyak 1 anggota untuk setiap fraksi kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan DPR. Dan ayat 6 disebutkan dalam hal kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tidak dapat terpenuhi, semua jenis rapat DPR tetap sah meskipun dihadiri oleh Pimpinan dan anggota secara virtual.

Kemudian dalam Pasal 274 ayat 1 menyebutkan bahwa Rapat Dengar Pendapat Umum adalah rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Panitia Khusus atau Alat Kelengkapan DPR lainnya dengan perorangan, kelompok, organisasi, dan/atau badan swasta. Dan ayat 3 disebutkan bahwa perorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum baik atas undangan Pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan.

Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan laporan dari Sekretaris BAKN DPR RI, RDPU BAKN DPR secara fisik dan virtual saat ini diikuti oleh 3 dari 9 anggota BAKN tapi karena ini tidak memerlukan kuorum jadi rapat ini akan tetap berjalan. *Insyallah* sebagian tadi sudah meminta izin untuk datang terlambat bergabung dalam rapat ini. Maka izinkanlah saya membuka Rapat Dengar Pendapat Umum pada hari ini, dan rapat pada hari ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.20 WIB)

Para Pimpinan dan para anggota BAKN,
Serta para undangan yang kami hormati.

Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu para pakar yang telah hadir dalam kesempatan ini dalam rangka mendapatkan masukan terkait

dengan kebijakan pengelolaan subsidi energi listrik, BBM dan gas. Secara teknis, pelaksanaan tugas BAKN terdapat dalam Undang-undang No. 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 17 tahun 2014 tentang MD3 dimana Pasal 112 D ayat 1 menyebutkan BAKN bertugas:

- a. Melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR,
- b. Menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi,
- c. Menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi, dan
- d. Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan serta penyajian dan kualitas laporan.

Selanjutnya sebelum kita mulai mendalami materi, izinkan saya ingin perkenalkan Pimpinan dan anggota BAKN yang hadir dalam kesempatan ini. Yang sebelah kiri ini walaupun pendatang baru tapi senior di antara kita Pak Misbakhun dari Fraksi Partai Golkar di Dapil Jawa Timur II. Kemudian di samping beliau Pak Amir Uskara dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dari Dapil Sulawesi Selatan I. Saya sendiri Ahmad Syaikh dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Jawa Barat VII.

Kemudian terkait dengan tema rapat kita pada hari ini, kami telah mengirimkan TOR pada para narasumber untuk pelaksanaan RDPU ini yang mana di dalamnya terdapat beberapa hal yang ingin kami dalam terkait dengan subsidi energi ini. Demikian saya kira pengantar dari saya. Selanjutnya kami persilahkan kepada para pakar untuk memberikannya terkait tema rapat kita dalam kesempatan hari ini. Mungkin Pak Faisal Basri dulu silakan.

NARASUMBER (FAISAL BASRI S.E., M.A):

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera.

Bapak Pimpinan dan anggota BAKN.

Terima kasih telah mengundang saya. Mungkin judulnya Subsidi Energi harusnya. Kalau boleh ditayangkan terus. *Concern* saya harusnya tunggal saja yakni menegakkan disiplin anggaran, karena tugas utama DPR di bidang anggaran ini luar biasa. Iya lanjut.

Intinya adalah, sebelumnya. Jadi kuncinya adalah produksi turun terus dan konsumsi naik terus sehingga sekarang kalau konsumsi dikurangi produksi itu sudah nyaris 1000.000 barel/hari. Bagaimana cara menutupnya? Jadi kita bukan negara produsen minyak lagi. Nah oleh karena itu paradigmanya pun berubah. Kalau dulu namanya *oilbum* kalau harga minyak naik, sekarang sengsara. Kalau harga minyak turun itu rezeki buat Indonesia secara keseluruhan karena kita *net importir*. Lanjut.

Ini defisit *oil and gas* yang di bawah itu yang merah adalah impor, yang di atas ekspor sehingga defisitnya adalah yang garis hitam itu. Jadi kita sudah mengalami defisit cukup lama 10 tahun lebih, hampir 10 tahun, sekitar 10 tahun. Namun paradigma kita untuk subsidi ini masih tidak berubah, begitu. Di masa surplus maupun di masa-masa defisit sekarang. Lanjut.

Nah kalau tadi Migas defisit, energi kita masih surplus karena ada batu bara yang abu-abu itu. Jadi yang bantu kita batu bara bidang energi ini. Namun, ya tapi ini barangkali sudah berubah setelah Pandemi Covid-19. 2021 lanjut. 2021 energi pun kita sudah defisit dan defisit energi kalau *business as usual* itu akan mencapai 80 miliar USD pada tahun 2040. Jadi krisis energi di depan mata, begitu. Ini yang jadi *concern* kami. *Business as usual* enggak boleh, karena kan kalau kata (suara tidak jelas) itu siapa yang menguasai makanan, dia menguasai rakyat. Siapa yang menguasai energi, yang menguasai negara itu. Siapa yang menguasai uang, dia menguasai seluruh dunia. Jadi hati-hati. Ini defisit seperti ini kecenderungannya, dan akselerasinya akan cepat Bapak-Ibu sekalian. Ngeri sekali kalau saya lihat ini. Lanjut.

Nah sekarang apa pengertian subsidi? Jangan dibawa repot. Pokoknya Pemerintah menetapkan harga di bawah keekonomian. Enggak apa-apa Pemerintah mau gratiskan pun enggak apa-apa, tapi keekonomiannya namanya subsidi kalau gratis kan? Jadi disubsidi senilai keekonomiannya. Nah inilah, keekonomiannya sendiri pun bermasalah karena keekonomian kan mops ditambah alpha, begitu. nah mopsnya premium enggak ada di Singapura. Enggak ada (suara tidak jelas) untuk premium dan enggak ada (suara tidak jelas) untuk solar dengan sulfur seperti kita dan tidak ada lagi mops pertalite karena tidak ada lagi yang jual. Di dunia ini praktis hanya 1-2 negara saja.

Jadi rumusnya pun aneh-aneh dan kami sudah merekomendasikan waktu di tata kelola Migas itu bagaimana mengubahnya. Jadi harga keekonomian pun sudah bermasalah ini yang ditetapkan Pemerintah, yang dihitung oleh Pemerintah, harga keekonomian untuk premium, solar dan LPG 3 kg. Nah yang menarik di LPG distributor sampai pengecer tidak pernah menuntut kenaikan (suara tidak jelas). Tapi ini belakangan deh, bukan yang utama.

Nah jadi sepanjang Pemerintah menetapkan harga di bawah keekonomian ya namanya subsidi. Nah namun di era Pak Jokowi itu disiplinnya kacau. Di era Pak SBY, saya bukan untuk membandingkan pribadi, enggak sama sekali. Di era Pak SBY sepanjang kriterianya memenuhi tadi ya makanya namanya subsidi. Oleh karena itu subsidinya menggelembung. Pernah subsidi energi itu 300 an triliun. Sekarang kan kalau di APBN kita cuma di bawah 100. Lanjut.

Nah dibikin lah jenis-jenis BBM ini yang paling bawah itu BBM umum, yang tidak disubsidi. Tapi itu pun harganya harus direstui Pemerintah, tidak bisa mekanisme pasar penuh. Jadi waktu Shell, Pertamina jual pertamax mau naikan atau turunkan harus izin Pemerintah. Enggak jelas lagi. Kemudian pernah di era Pak Jonan kalau saya enggak salah, atau yang sekarang saya lupa, swasta enggak boleh mengimpor langsung BBM nya, harus lewat Pertamina. Pusing swastanya. Dia dulu masuk Indonesia karena boleh impor langsung. Nah kalau beli dari Pertamina 9600, beli langsung 7500. Lantas mereka *complain* ke Dirjen Migas, Dirjen Migasnya telepon sama Pertamina "*turunin dong*", *turunin*, jadi modal telepon. Jadi pengelolaan energi kita seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Jadi saya gembira BAKN *concern* tentang ini.

Kemudian jenis BBM Khusus Penugasan. Ini juga tidak jelas. Ini premium yang dijual di luar Jamali (Jawa Bali Madura). Dapat tambahan ongkos angkut Rp. 500,- sekarang saya enggak tahu ya, kira-kira Rp. 500 / liter. Kenapa Jamali? Apa urusannya dengan Jamali? Balikpapan kan punya kilang. Banten tidak ada kilang tapi jauh dari kilang ya harganya sama, enggak jelas kenapa Jamali? Papua juga ada kilang, Dumai ada kilang tapi harganya disubsidi. Enggak jelas.

Kemudian BBM Tertentu atau BBM bersubsidi ini, minyak tanah dan solar. Jadi secara aturan premium itu tidak disubsidi, secara aturan menurut Perpres No. 191 tahun 2014. Tapi harganya ditentukan Pemerintah dan Pertamina diwajibkan untuk tidak menaikkan harga premium atau menurunkan harga premium, tapi tidak jadi subsidi kalau harga Pemerintah itu di bawah ongkos, tidak ada subsidi. Ya sudah tenang saja kata Pemerintah, nanti hitung-hitungannya gampang. Yang penting tidak lewat DPR, begitu saja. Keluarlah namanya dana kompensasi.

Nah dana kompensasi ini bayarnya suka-suka Pemerintah sehingga piutang BUMN Pertamina dan PLN itu melonjak luar biasa sampai 3 tahun enggak dibayar-bayar. Menyebabkan *cash flow* BUMN itu terganggu. Menyebabkan PLN pada bulan Desember yang lalu tidak punya uang untuk bayar hutang yang jatuh tempo. Akhirnya kalah, Pemerintah *nyicil* dulu 9 triliun, begitu. Ini kan bukan perkumpulan RT, ini perkumpulan Republik Indonesia. Itulah yang menimbulkan dana besar untuk dana kompensasi tapi masuknya ke Covid. Apa urusannya dengan Covid juga tidak ada sama sekali. Jadi sebetulnya stimulus untuk Covid kecil sekali. Ada, tidak ada stimulus kan itu harus dibayar oleh Pemerintah. Jadi kacau, tambah kacau. Lanjut.

Jadi kalau untuk mengurangi subsidi, logikanya kasih insentif untuk non ICE *vehicle* biar enggak pakai BBM. Tapi tidak juga arah ke sana. Tapi digunakan cara-cara yang aneh, begitu. Lanjut. Muncul biodiesel. Subsidi energi yang belum masuk biodiesel tiba-tiba di tengah pandemi ada subsidi untuk Martua Sitorus dan kawan-kawan 2,8 sekian. Karena apa? Dana sawitnya September ini habis yang 50 dolar/ton itu yang dikelola oleh Kementerian Keuangan kalau enggak salah. Dulu Kemenko, sekarang ditambah lagi 5 jadi 55 dolar. Jadi makanya tidak ada di APBN itu pakai dana sawit itu, non *budget* dana sawit nah sawitnya mau habis.

Maka untuk mengamankan Martua Sitorus dan kawan-kawan keluarlah dana 2,87 triliun itu di APBN Pandemi. Martua Sitorus itu bayar pajaknya 700 milyar, dapat subsidinya 1,2 T dan kawan-kawan ya maksudnya. Jadi dimanfaatkan pandemi ini untuk memasukkan kedaruratan ini. Karena selisih harga CPO dengan harga minyak makin tinggi. Muncul masalah baru, subsidi BBM belum beres, sebentar lagi muncul subsidi B30. Jadi menciptakan masalah baru lagi, pos baru lagi seperti dulu LPG. Mengurangi subsidi minyak, subsidi minyak tanah yang paling besar, sekarang subsidi LPG nya meledak. Enggak kunjung selesai kita mengurus energi ini. Lanjut.

Nah ini, nama PT-PT nya ini ada 11 kalau enggak salah supaya kita, kalau saya mau bikin pabrik biodiesel enggak bakal dikasih oleh Pemerintah karena mereka set kapasitas tinggi, memanfaatkan kapasitasnya. Tahun lalu ya harus saya sampaikan ini. Tahun ini belum saya *update*, tapi tahun lalu itu kira-kira bulan Oktober kira-kira cuma 35% kapasitas yang dipakai. Investasi mereka tinggi kan? Untuk kapasitas yang tinggi itu pemanfaatannya 35%. Tapi bisnis ini dijamin tidak rugi karena apa? Kalau ada selisihnya otomatis ditutup oleh Pemerintah makanya duitnya habis. Lanjut.

Nah sehingga Bapak-Ibu sekalian, yang namanya data subsidi di APBN bukan subsidi saja, yang lain-lain juga semu. Subsidi tidak naik, tetapi muncul penugasan pada BUMN Pertamina dan PLN. Muncul istilah dana kompensasi. Dana kompensasi itu kalau tidak salah untuk PLN saja waktu kami rapat dengan PLN kira-kira 75 ya, sampai akhir tahun ini 75 triliun. Terus gali lubang tutup lubang. Bayar sedikit, tambah lagi, bayar sedikit, tambah lagi. Tidak ada penyelesaian sampai sekarang. Karena apa? Pencairannya bisa lebih dari 1 tahun. 3 tahun yang lalu juga belum dibayar penuh, begitu. Ini mengurus negara kok kaya begini?

Belum ditambah penugasan lain, BBM satu harga diserahkan pada Pertamina, kan enggak boleh? Pemerintah boleh melakukan penugasan apa pun, tapi pertanggung jawabannya ada di APBN. Enggak boleh dititip-titipkan di BUMN. Ini juga seperti BUMN-BUMN karya. Penugasan, Utama Karya kan penugasannya paling luar biasa, dapat dana Covid nya juga paling banyak. Tapi masuknya di Covid supaya anggota DPR maklum ini krisis karena Covid. Tidak ada urusannya dengan Covid penugasan ini. sampai ada 3 jenis kan BUMN dapat itu. Penyertaan modal negara dapat, kemudian halaman investasi itu karena tidak bisa bayar hutang itu. Tapi (suara tidak jelas) investasi harus dibayar, memangnya Pemerintah bank?

Atas nama Covid karena Pemerintah posisinya kuat di DPR 67%, 68% kursi Pemerintah. Sehingga apa pun kalau saya diskusi dengan anggota DPR, kritis tapi kalau ada perintah Ketum ya kita patuh Pak katanya. Ya sudah. Jadi penggerogotan kehidupan bernegara yang sehat. Bangun rumah sakit, Pertamina suruh bangun rumah sakit untuk Covid ini. *Ngeluh* tapi kita enggak bisa berbuat apa-apa Pak. suka-sukanya. Ibu kota baru suruh bangun, menara BUMN itu Pertamina yang harus bangun. Dan Pertamina wajib untuk pindah seluruhnya ke Ibu kota baru. Menurut saya rencana-rencana seperti ini harus kita hentikan lah. Di sini peran parlemen luar biasa. Oleh karena itulah harus ada transparansi secara fiskal, harus dipertanggung jawabkan satu sen pun anggaran, itu. Lanjut.

Jadi kebijakannya tambal sulam. Hendak mengurangi impor minyak dengan mengalokasikan produksi dalam negeri untuk kilang domestik. Jadi kalau produksi dalam negeri dipakai di domestik kan impornya berkurang, tapi kan ekspornya turun juga. Jadi 0 efeknya 0. Cuma kelihatan di statistik impor itu turun. Hendak mengurangi impor BBM dengan melarang swasta impor langsung, tadi yang sudah saya sampaikan. Hendak menekan defisit karena (suara tidak jelas) tapi hasilnya tidak signifikan.

Sebetulnya saya diminta *review* kajian tentang BBM ini tapi belum selesai dan saya belum minta izin ke yang meneliti, harus izin. Tapi intinya adalah sangat tidak signifikan. Karena apa? Kalau pakai biofuel, kalau pakai CPO, ekspor CPO nya kan turun. Impor minyaknya turun tapi ekspor CPO nya juga turun. Jadi karena (suara tidak jelas) nya tidak signifikan, cuma ratusan juta dolar sampai 1 milyar dolar. Mungkin puluhan juta dolar, 70 juta dolar atau berapa itu. Jadi tidak signifikan. Enggak mengurangi subsidi BBM tapi muncul post subsidi biofuel atau Fame.

Lanjut, ini yang terakhir. *Concern* Pemerintah kan inflasi. Inflasi itu paling tidak populer buat politisi. Oleh karena itulah tidak pernah berani dinaikkan harga BBM menjelang pemilu. Pas jadi Presiden Pak Jokowi langsung naikkan tapi itu sekali dan terakhir. Kita pikir tadi mau reformasi total, tapi sekali dan terakhir saja yang secara signifikan. Nah oleh karena itu menurut saya yang paling pertama ini harus tegakkan aturan. Aturannya sudah ada tapi tidak diterapkan. Kalau saya tanya Pak Dirjen dulu, kok enggak diterapkan aturannya? Oh tetap ditegakkan, kan dievaluasi setiap 3 bulan. Ya kita evaluasi, tapi kesimpulannya kita harga tetap, harganya tidak dinaikkan. Iya itu namanya silat lidah. Ketakutan harga BBM berfluktuasi sehingga menyumbang pada inflasi, bisa dikurangi dengan dana tabungan.

Misalnya sekarang ini, kan harusnya kalau harga pertamax plus di Malaysia Bapak-Ibu sekalian, bulan Mei kemarin itu cuma 4800, pertamax plus ron 95, 4800. Makanya saya tadi pertanyakan, harga keekonomian Pemerintah itu kok tinggi benar, begitu. Nah jadi oke kalau harga *anjlok*, kan harusnya harga BBM *anjlok* juga. Enggak, separuhnya yang dikasih ke konsumen. Penurunannya 50% ini cuma 25%. 25% nya ditabung. Sehingga waktu harga naik, tidak otomatis dinaikkan serta merta *full*, tapi pakai dana tabungan dulu. Kalau dana tabungannya turun, sudah merosot,

baru dinaikkan. Ada mekanisme untuk meyakinkan Pemerintah bahwa inflasi itu tidak harus jadi *concern* aman. Dan luar biasanya memang inflasi di era Pak Jokowi konsisten rendah, tapi dengan injak kaki sebetulnya. Harga listrik sudah 3 tahun tidak boleh naik padahal sudah ada *adjustment*, otomatis kan tidak ada masalah.

On and off PPN, jadi misalnya kan ada PPN atau ada dana apa, kita masukkan di sana. Kalau harga sedang naik, PPN nya dihapus. Menteri Keuangan tentu saja tidak setuju, tapi sejenis seperti itu ada instrumennya, jangan injak BUMN terus. Dan terakhir adalah menggalakkan eksplorasi dan eksploitasi dengan rezim yang fleksibel. Bapak-Ibu coba bayangkan kalau kita impor saja itu Pemerintah enggak dapat apa-apa. Enggak dapat dana bagi hasil, enggak dapat pajak karyawan, enggak ada. Tapi coba kalau produksi meningkat, produksi minyak meningkat maka ada bagian Pemerintah di sana. Ada PPN ada PPH, keuntungan perusahaan dan macam-macam banyak sekali.

Nah oleh karena itu kalau Bapak-Ibu simulasi itu akan jauh lebih bermanfaat kalau kontraktor minyak itu tidak dikenakan bagi hasil. Jadi *tax* rezim saja seperti perusahaan-perusahaan lain. Itu niscaya produksi akan naik. Sederhana Pak, niscaya produksi akan naik. Nah kalau sekarang Indonesia minat investasi di Migasnya turun terus karena misalnya di Mexico pakai *grow split* tapi jatah pengusaha itu jatah kontraktor 95%. Kita pakai *grow split* paling cuma 67%.

Jadi kita bukan surga lagi buat produsen minyak. Oleh karena itulah maka kita harus lewat menggalakkan eksplorasi dan eksploitasi itu ongkosnya lebih murah, jauh lebih murah ketimbang mengembangkan B20, B30 demi kepentingan segelintir pengusaha yang sudah menjadi *bodyguard* di negeri ini, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Faisal Basri, S.E., M.A yang sudah memberikan penjelasan yang gamblang pada kita tentang subsidi minyak dan gas. Kita lanjutkan pada Dr. Enny Srihartati, M.A, nanti kemudian nanti kita akan *sharing* di belakang. Silakan Bu.

NARASUMBER (Dr. ENNY SRIHARTATI, M.A):

Terima kasih.

**Pak Ketua Pak Ahmad Syaikh,
Dan tadi ada Pak Amir Uskara,
Dan juga Bapak-Ibu Tenaga Ahli BAKN,
Dan semua yang hadir dalam forum ini.**

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Jadi persoalan-persoalan krusial dan sebenarnya yang menjadi biang kerok dari persoalan energi tadi sudah disampaikan oleh Pak Faisal Basri. Mungkin Pak Ketua saya hanya akan lebih, apa sih dari persoalan-persoalan yang krusial tadi implikasinya terhadap perekonomian kita dan utamanya terhadap kehidupan masyarakat kita? Kira-kira seperti itu dan mungkin saya akan menyampaikannya merunut sesuai dengan pertanyaan yang kemarin dikirim oleh BAKN.

Jadi pertama kemarin pertanyaannya, apakah kebijakan dan metode dalam pemberian subsidi energi yang diterapkan oleh Pemerintah saat ini sudah cukup baik atau belum? Begitu kan. Maka marilah kita runut, sebenarnya apa sih esensi

atau urgenitas dari Pemerintah harus mengeluarkan subsidi? Tadi sudah di hantarkan oleh Pak Faisal mengenai harga keekonomian, tetapi yang pasti secara kepentingan atau kebutuhan ekonomi esensi dari subsidi ini kan sebenarnya mengoreksi terjadinya *market failure*, atau kegagalan pasar. Jadi antara harga keekonomian dengan akses masyarakat ini belum seimbang. Jadi kalau masyarakat kita sudah mampu semua, sebenarnya enggak perlu ada subsidi. Tetapi ada sebagian masyarakat kita yang masih belum beruntung nasibnya, masih miskin sehingga kalau harga subsidi atau karena energi ini merupakan faktor produksi utama dan sangat mempunyai dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, maka ini yang harus perlu dijaga.

Nah cuma persoalannya sebenarnya, kalau bisa saya sampaikan dengan kalimat pendek, mengapa subsidi yang sebenarnya bukan barang haram ini menjadi satu polemik yang berkepanjangan? Karena kembali tadi esensi dari subsidi yang seharusnya menjadi penetralisir, mengoreksi *market failure*, tetapi justru menciptakan *government failure*. Jadi dengan adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah yang di (suara tidak jelas) diceritakan disampaikan Pak Faisal tadi itu malah membuat kebijakan ini menjadi sumber *failure* lagi dari adanya kebijakan Pemerintah yang kita sebut subsidi. Apa buktinya?

Mari kita misalnya kembali bahwa esensi dari subsidi tadi untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Tapi coba kita lihat apakah energi yang menjadi kebutuhan kita dalam perekonomian ini sudah memenuhi, mendorong kita untuk bisa mencapai memiliki energi yang efisien? Jadi kalau pada awalnya untuk agar masyarakat semua mampu mengakses energi ini, maka kan sebagian diberi subsidi. Tetapi mestinya di samping itu secara paralel, Pemerintah pada prinsipnya karena energi merupakan faktor produksi yang sangat vital, mestinya target utamanya adalah bagaimana menciptakan faktor produksi yang vital tadi menjadi efisien? Artinya efisien itu yang benar-benar mampu dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi secara sederhana kan sebenarnya teorinya sesederhana itu.

Nah tetapi dengan adanya subsidi ini, mengapa tadi saya sampaikan justru menciptakan *government failure*? Karena dengan adanya subsidi bukan semakin kita mampu menuju swasembada energi, tetapi yang terjadi justru peningkatan ketergantungan energi kita terhadap impor ini malah semakin menjadi-jadi atau semakin membesar. Nah jadi, satu, kita sudah menyalahi dari esensi urgenitas adanya subsidi itu sendiri. Dan yang kedua, dengan adanya subsidi ini justru menciptakan ketergantungan energi impor.

Nah jadi pertanyaan yang pertama ini sebenarnya cukup *simple* dijawab. Apakah subsidi yang diterapkan oleh Pemerintah sudah cukup baik? Itu dari dua hal itu saja sudah kontra-produktif antara tujuan utama dengan apa yang seharusnya terjadi. Nah sehingga mestinya bagaimana agar subsidi ini energi ini mampu punya dampak, mestinya bagaimana Pemerintah juga memberikan satu insentif justru terhadap pengembangan energi-energi alternatif yang mampu mendorong terpenuhinya energi yang betul-betul tadi, tidak hanya efisien, tetapi juga bisa kita penuhi dari pasokan dalam negeri. Dan nanti kalau mau kita *explore*, apakah, selamat datang Pak Ketua.

Jadi apakah itu memungkinkan? Sangat-sangat memungkinkan. Karena sumber alternatif dari, atau energi-energi alternatif yang kita miliki ini sangat terbuka, artinya potensinya sangat banyak. Nah cuma yang menjadi persoalan adalah ketika BBM ini dalam tanda kutip kita biarkan murah, maka sudah pasti ini akan menjadi disinsentif untuk pengembangan atau lahirnya energi-energi alternatif tadi, begitu.

Nah kedua adalah, tadi sudah ketergantungan impor tadi. Jadi ketergantungan impor ini kan efeknya tidak hanya terlihat dari dampak terhadap inflasi atau yang pasti dengan adanya ketergantungan impor maka nasib ketahanan energi kita sangat ditentukan oleh kondisi eksternal. Nah sementara kondisi eksternal sudah hampir bisa kita pastikan tidak *undercontrolled* kebijakan-kebijakan dalam negeri kita. Nah sehingga dari situ saja sudah menimbulkan risiko yang sangat besar terhadap kesinambungan atau kepastian dalam pemenuhan energi di dalam negeri kita.

Belum lagi kalau sering disampaikan tadi, banyak kepentingan-kepentingan politik yang lebih mewarnai. Jadi artinya kepentingan jangka pendek, mungkin kepentingan politik secara ekonomi sebenarnya ini lebih di, kalau mau *khusnuzon* itu sebenarnya ya lebih untuk memprioritaskan kepentingan-kepentingan jangka pendek. Artinya untuk menghindarkan syok apabila terjadi kenaikan BBM dan sebagainya yang harus dihindari karena berisiko untuk terjadinya gejolak sosial yang ada di masyarakat dan sebagainya.

Nah ketiga, mengenai beban fiskal. Jadi memang dengan adanya kebijakan pengurangan subsidi yang 2020 ini kan hanya tinggal secara total, subsidi energi tinggal 125,3 triliun. Jadi kalau kita bandingkan posisi 2014 misalnya yang masih lebih dari 341 triliun ini memang sudah mengalami penurunan yang sangat jauh. Nah tetapi persoalannya, apakah beban fiskal atau penurunan beban fiskal ini tidak mengalihkan atau tidak terjadi *shifting* terhadap beban yang lain?

Nah jadi kalau kita lihat sekarang, dengan adanya penurunan subsidi energi ini kan menyebabkan berbagai macam dan terutama ini muncul pas Covid kemarin, pengaduan terhadap PLN itu lebih dari 68.000 pelanggan. Jadi kalau yang mengadu saja, itu yang mengadu. Bisa jadi yang terdampak dan tidak mengadu ya lebih dari itu. Artinya ada hampir 70.000 orang pelanggan yang melakukan pengaduan. Nah di antaranya karena terjadi pembengkakan tagihan listrik. Bisa jadi memang pembengkakannya karena *work from home* karena yang tadinya biasanya kalau siang penggunaan listriknya dikantor menjadi di rumah dan sebagainya. Tetapi titik krusialnya adalah bahwa ketika terjadi penurunan beban fiskal karena subsidi ini dikurangi, tetapi kita lihat bagaimana realokasi dari besaran subsidi ini mengurangi beban masyarakat atau tidak?

Jadi kan dulu selalu disampaikan bahwa subsidi BBM ini tidak tepat sasaran karena yang menikmati lebih banyak orang kaya yang memiliki kendaraan atau konsumsi yang terbesar tentu yang memiliki mobil. Nah pertanyaannya, setelah subsidi energi ini dikurangi, apakah hak yang seharusnya menerima subsidi tadi bertambah atau tidak? Nah ternyata tidak, begitu kan.

Nah di samping itu sebenarnya yang harus dijaga dalam perekonomian itu kembali ke tadi. Jadi apakah Pemerintah mampu menyiapkan atau menyediakan energi yang betul-betul relatif terakses oleh masyarakat atau tidak? Karena sekalipun masyarakat miskin itu konsumsi BBM nya tinggi, tapi kalau harga energi ini tetap tidak efisien, maka yang menikmati beban terbesar tetap orang miskin karena menyebabkan, mendorong harga-harga menjadi tidak ekonomis sehingga mereka juga harus membayar lebih mahal. Sementara kompensasi dari kenaikan harga-harga yang diakibatkan oleh pengurangan subsidi itu juga belum tentu sepadan. Nah sehingga ini yang menimbulkan angka orang miskin dan sebagainya tidak banyak mengalami penurunan yang signifikan.

Jadi Bapak-Ibu sekalian,

Antara penurunan beban fiskal dengan beban yang harus ditanggung oleh masyarakat, menurut kami ini juga harus menjadi *concern* politik anggaran DPR. Nah kedua juga kan yang selalu menjadi pembahasan itu kan harga BBM bersubsidi. Kita lupakan bahwa ketika sektor-sektor industri ini juga harus menanggung biaya energi yang mahal, ini juga menjadi sumber ketidakefisienan yang menyebabkan daya saing mereka juga tidak mampu bersaing dengan kompetitor-kompetitornya. Nah sehingga ini kan juga rentetannya panjang. Kalau industri di dalam negeri ini bahan baku energinya mahal, tentu yang pasti tidak memberikan insentif investor untuk masuk sekaligus walaupun ada investor yang mau berinvestasi menjadi barangnya tidak kompetitif dengan yang lain.

Jadi tidak hanya mereka mampu menguasai pasar, tidak mampu menembus pasar ekspor sekaligus untuk bisa penetrasi di pasar domestik pun bisa jadi juga kalah untuk bersaing. Nah sehingga beberapa momentum sebenarnya kalau kita mampu menciptakan energi yang efisien ini kan sumber daya kita yang luar biasa di perkebunan, terus di pertambangan ini mampu diciptakan satu hilirisasi yang nilai tambahnya luar biasa besar.

Nah pertanyaan yang kedua adalah bagaimana, apakah ada perbaikan yang perlu dilakukan dalam proses perencanaan penganggaran, pengalokasian serta penyaluran agar pemberian subsidi energi tersebut lebih efektif, efisien dan ekonomis. Nah yang pertama mungkin ini kita harus *break down* satu-satu dari subsidi BBM, subsidi LPG dan subsidi listrik dan juga tadi saya tambahkan untuk gas untuk energi, eh gas untuk industri.

Jadi untuk subsidi BBM, walaupun Pemerintah, Pemerintah akan memberikan subsidi, tetap memberikan subsidi untuk BBM ini kan ada 2 risiko sebenarnya untuk risiko ketidakefektifannya. Pertama tadi dari sisi produksi dan sisi konsumsi. Sisi produksi kalau kita bandingkan tadi Singapura cuma pertalite cuma 4500 ya Pak Faisal ya? Jadi kita enggak bisa menilai dari sisi produksi ini apakah Pertamina mampu menghasilkan satu BBM yang benar-benar efisien atau tidak dengan model subsidi ini?

Nah kedua dari sisi konsumsi tadi telah sampaikan bahwa potensi ketidaktepat sasaran dari subsidi BBM ini jelas cukup tinggi, karena tidak bisa ada diferensiasi harga untuk masing-masing anggota masyarakat. Nah tetapi untuk yang konsumen kalau mau sebenarnya ada terobosannya atau ada gungtingnya untuk mengeliminasi adanya ketidaktepat sasaran misalnya dengan subsidi bersyarat. Jadi untuk BBM kita juga enggak tahu ini ada komunikasi apa tidak antara Komisi XI dengan Komisi VI karena untuk pupuk, eh Komisi IV pupuk itu kan Komisi IV.

Jadi subsidi BBM, BBM yang notabene ini dinikmati, dikonsumsi oleh hampir seluruh orang tidak terkecuali apa pun profesinya. Sementara subsidi pupuk itu sudah pasti yang mengonsumsi pasti petani. Tetapi subsidi pupuk itu harus bersyarat dengan harus mengisi yang namanya Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau e-RDKK. Lah petani kok suruh mengisi yang namanya elektronik dan sebagainya. Jadi enggak mengerti kita logikanya itu. Jadi sementara yang subsidi BBM bebas. Nah sehingga hal-hal yang kaya begini mestinya kalau memang subsidi ini harus efektif ya harus ada *tools* yang untuk sebagai instrumen agar subsidi ini efektif.

Nah kedua, subsidi LPG. Jadi nanti yang lain mungkin bisa dibaca di dalam *print out* jawaban kami. Nah kedua, subsidi LPG yang 3 kg. Jadi LPG ini konon per kilonya kan subsidi nya ini mencapai 7000. Nah tetapi sehari ini masyarakat yang 3 kg itu paling murah itu kan 20-21-22000. Nah artinya apa? Artinya sebenarnya berapa harga keekonomian gas LPG itu? Itu pertama. Nah itu yang enggak pernah

juga kita mendapatkan perhitungan yang transparan. Nah kedua adalah sama halnya dengan BBM. Jadi BBM kita subsidi, sementara kita tidak punya produksi dalam negerinya. Net importir BBM tapi BBM disubsidi. Demikian juga gas. Gas kita punya gas bumi yang luar biasa banyaknya, besarnya. Tetapi yang kita gunakan lebih banyak LPG yang harus kita impor.

Nah jadi sebenarnya hal-hal yang seperti pilihan-pilihan kebijakan ini menurut saya ini yang mulai harus *refocusing*. Kalau sekarang kan yang lagi tren kan bahasanya *refocusing*. *Refocusing* dari program Pemerintah untuk benar-benar kalau memberikan subsidi tidak hanya tadi, tetapi energi yang mana, sumber energi yang mana yang perlu kita berikan subsidi.

Nah listrik juga demikian. Jadi selama ini kan Pemerintah sudah mengalokasikan untuk subsidi listrik, tapi ini kan bukan persoalan, selalu yang disampaikan tarif listrik di antar negara itu Indonesia masih lebih rendah dari negara-negara tetangga. Tetapi persoalannya di sebagian besar masyarakat 40% berpendapatan rendah itu komposisi besaran pengeluaran untuk membayar listrik dari sumber pendapatannya itu cukup besar.

Katakanlah misalnya kalau kita ilustrasikan UMP itu kan di banyak daerah masih sekitar 2 juta. Sementara membayar listrik per bulan sekalipun mereka menggunakan 450.000, eh 450 volt itu, ini kan tidak ada yang di bawah membayarnya sebulan tidak ada yang di bawah 200.000. Artinya minimal sekali porsi pengeluaran untuk membayar listrik ini kan sekitar 10% sendiri. Nah belum untuk kebutuhan-kebutuhan pokok. Orang miskin itu 75% itu untuk makanan. Jadi kalau untuk listrik sudah 10% berarti kan sudah 80% sendiri. Nah untuk memenuhi kebutuhan yang untuk meningkatkan peningkatan kualitas SDM dan sebagainya dari mana?

Jadi ini yang mungkin perlu kita perhatikan. Nah bagaimana sebenarnya agar listrik ini tidak membebani subsidi Pemerintah, tetapi juga menjadi sumber energi yang efisien bisa tidak membebani masyarakat. Nah sebenarnya instrumen untuk membuat harga atau tarif listrik ini lebih efisien ini kan sebenarnya jauh lebih sederhana. Jadi katakanlah misalnya dari sumber-sumber pembangkit PLN ini asal efisien ini kan tentu PLN akan menghasilkan tarif listrik yang juga efisien.

Jadi kita ingat betul waktu misalnya PLN tiba-tiba akan menaikkan tarif, tetapi Pemerintah memutuskan untuk dilakukan DMO batu bara. Itu tarifnya langsung bisa ditekan. Nah jadi kalau bukan PLN sekarang misalnya DMO batu bara sudah, kenapa misalnya gas juga tidak dilakukan DMO? Nah kalau gas dan batu bara dilakukan DMO dan karena PLN ini memenuhi pabrik kebutuhan masyarakat, begitu, mengapa harga PLN ini tidak boleh dibedakan dengan yang ada di *market*? Nah sehingga sederhananya kalau sumber pembangkit dari PLN ini bisa efisien tentu tarif PLN juga lebih murah. Sebenarnya Pak Faisal akan jauh lebih banyak cerita karena siapa yang menyebabkan sebenarnya pasokan batu bara dan gas yang dibayar oleh PLN jauh lebih tinggi ya karena banyaknya (suara tidak jelas) yang luar biasa banyak, begitu kan. Rantai pasok dan sebagainya.

Nah tetapi intinya, listrik ini kan akan menuju sebenarnya yang namanya *green energy*. Jadi lebih rama lingkungan dan sebagainya dari pada misalnya industri-industri itu langsung menggunakan batu bara itu kan jauh lebih berpotensi mencemari lingkungan. Tapi kalau kebutuhan industri itu dipenuhi oleh listrik dan listriknya efisien, maka dua-duanya dapat. Secara hitung-hitungan kalkulasi ekonomi ini akan mendorong, meningkatkan daya saing dan memenuhi aspek dari lingkungan.

Nah tambahan mungkin gas energi untuk industri. Kenapa kita ingatkan? Ini kan sudah menjadi paket stimulus Pemerintah dan ada di Perpres nya begitu kan? Tetapi sampai hari ini tidak kunjung terealisasi. Jadi persoalannya ada di (suara tidak jelas) dan sebagainya. Nah itu yang mungkin pasti Bapak-Ibu yang di DPR jauh lebih memahami. Saya hanya sekedar untuk kembali mengingatkan.

Nah pertanyaan ketiga, apakah pemberian energi ini telah menghasilkan dampak yang diharapkan sesuai dengan tujuan pemberian subsidi tersebut? Nah sekarang apakah subsidi tadi kan utamanya ditujukan untuk kelompok yang memang tidak beruntung yang harus diberikan subsidi. Nah sekarang apakah kelompok dari masyarakat miskin ini sudah lebih banyak proporsinya yang menikmati subsidi atau belum? Jadi kalau jawabannya belum ya artinya ini harus perlu disempurnakan.

Nah kedua, apakah subsidi energi di Indonesia ini tepat sasaran? Karena porsi terbesar tadi justru dinikmati oleh orang kaya dan skema subsidi di Indonesia ini justru berpotensi dimanfaatkan oleh para (suara tidak jelas). Jadi sebenarnya pertanyaan ketiga ini saya hanya *meresume* dari apa yang tadi kita sampaikan, kami sampaikan.

Nah bagaimana di tengah Covid? Di tengah Covid itu justru sekarang ini kan ada momentum dimana harga BBM ini sangat murah, bahkan (suara tidak jelas) beberapa bulan yang lalu kan mendekati sampai angka rendah sekali begitu kan? Nah sebenarnya ini momentum kita untuk melakukan transisi. Artinya transisi, sembari kita menyiapkan tadi *refocusing* untuk menyiapkan energi-energi yang betul-betul efisien dan menuju swa sembada energi yang energi yang kita mampu tidak menimbulkan ketergantungan impor tadi, tetapi ini kan mengalami pasti *delay* atau butuh waktu yang tidak mungkin jangka pendek.

Nah dalam jangka pendek ini mumpung harga energi atau maaf, harga BBM ini murah dan alokasi subsidi yang dialokasikan Pemerintah juga tidak terpakai maka mestinya ini tidak boleh di realokasi apa pun namanya demi karena untuk Covid dan sebagainya, mestinya ini untuk meningkatkan, meningkatkan cadangan dari Pertamina sehingga kalau pun nanti minimal ada suatu kepastian dalam jangka tertentu ini sudah tidak akan mengotak-atik besaran subsidi dan besaran subsidi yang bertahap secara jangka beberapa tahun ke depan ini tetap dialokasikan, ini bisa di realokasi untuk kepentingan yang pertama tadi.

Nah beberapa aturan sebenarnya sudah banyak yang ada, tetapi hampir semua kalau kita *list* di dalam halaman terakhir yang kami sampaikan ini adalah bahwa hampir semuanya masih retorika. Jadi ada aturan-aturan bagaimana untuk mendorong adanya EBT, adanya beberapa energi yang akan dikembangkan termasuk misalnya dana fasilitas atau fasilitas dana *geothermal* dan semuanya ada aturan-aturannya, tetapi ini kan selalu minim dalam implementasi, begitu.

Jadi kira-kira demikian Pak Pimpinan. Jadi mohon maaf kalau waktunya terlampaui. Terima kasih atas kesempatannya.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Bu Dr. Enny Srihartati, M.A yang sudah menjelaskan sedemikian gamblang terkait dengan beberapa hal subsidi energi yang tadi sudah

dipaparkan. Berikutnya mungkin kita berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Ir. Ratnayu Sitaresmi, MT. Cuma barangkali Bu karena Pak Faisal juga tadi informasi sampai jam 12 bisanya jadi mungkin bisa disampaikan ((suara tidak jelas). Terima kasih Bu, silakan.

NARASUMBER (Dr. Ir. RATNAYU SITARESMI, MT.):

Bissmillahirrahmanirrahim.

Baik terima kasih bapak.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om Swastiastu, Namu Budaya.

**Yang mulia Bapak Pimpinan BAKN DPR RI,
Yang mulia Bapak-Ibu anggota DPR RI,
Yang kami hormati Bapak-Ibu narasumber, dan juga
Yang kami hormati para hadirin sekalian.**

Selamat pagi, perkenalkan saya sebagai Dosen Teknik Perminyakan Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi. Kemudian mohon maaf ini saya terlalu mendadak diberi tahu Pak, jadi kami tidak terlalu siap. Tapi mudah-mudahan saja ini yang kami sampaikan bisa bermanfaat.

Jadi mengenai masukan dari pengelolaan subsidi energi listrik. Jadi kata kuncinya itu adalah keterbukaan. Jadi adanya keterbukaan PLN dalam menerapkan perhitungan harga pokok produksi dari PLN. Kemudian perhitungan HPP Power Plan dan perhitungan biaya transmisi yang dikirim melalui kabel untuk masing-masing daerah yang dipasok listrik menuju ke pengguna.

Nah sebagai contoh sebetulnya PLN ini kan memiliki sebagian besar pembangkit listrik tenaga diesel di mana kemudian perlu membeli solar dari Pertamina. Nah ternyata mungkin Pertamina ini tidak semua bisa dipenuhi sehingga akhirnya solar itu diberikan kepada swasta yang tentunya akan membuat harga itu tidak satu harga, begitu. Nah kemudian HPP Power Plan ini dalam hal ini PLTD harus ditambah dengan, seharusnya ya, biaya transmisi, biaya perlengkapan panel, *customer* kemudian biaya operasi lainnya, baru diperoleh harga pokok penjualan.

Nah jadi HPP Power Plan itu sebetulnya kan termasuk biaya transmisi, biaya perlengkapan, biaya operasional sehingga jadi harga pokok penjualan. Jadi harga, tetapi ini harga jual PLN ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR. Jadi yang ditanggung oleh pelanggan ini dirasa jadi memberatkan karena harga pokok penjualan PLN lebih tinggi dari yang seharusnya ditagihkan ke pelanggan.

Seperti misalnya biaya pemasangan. Pemasangan listrik itu kan ditanggung oleh *customer*, tentunya di DKI terutama Pak. Sebetulnya itu bisa dicicil selama mungkin 10 tahun sehingga tidak terasa. Padahal kalau kita memasang itu biayanya cukup besar. Nah kemudian ini jadi akhirnya yang perlu disubsidi dan diharapkan *customer* membayar lebih. Harusnya ya, membayar lebih murah dari HPP yang ditetapkan oleh Pemerintah, begitu. *Next.*

Jadi langsung saja saran dan masukan untuk DPR bahwa perlu meminta rincian perhitungan harga dan laporan keuangan 5 tahun terakhir agar dapat dikaji dan di analisa lebih proporsional. Kemudian sebaiknya DPR dibantu auditor dari

Badan Pengawas Keuangan dan didampingi seorang profesional auditor yang independen sehingga kelayakan biaya yang dikeluarkan PLN untuk operasional itu lebih diterima oleh semua pihak. Kemudian sebaiknya juga auditor keuangan dibantu oleh dukungan *engineer* agar dapat mengukur kelayakan biaya dari proses produksinya.

Kemudian selanjutnya hindari terjadi auditor tidak banyak yang, iya pokoknya selama ini itu mungkin auditor tidak banyak memahami secara teknis, secara mendalam, sehingga berpotensi untuk menyembunyikan biaya-biaya siluman dan hal tersebut dapat dikategorikan korupsi. Kemudian selanjutnya adalah perlu juga dikaji ulang penerapan harga BBM yang dijual ke industri ini kok jauh lebih murah dari pelanggan masyarakat menengah ke bawah? Itu yang memberatkan. Saya rasa demikian saja masukan saya.

*Wa Billahitaufik Walhidayah
Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Bu Dr. Ir. Ratnayu Sitaresmi, MT. Sudah memberikan paparannya.

Bapak-bapak Ibu-Ibu saudara sekalian,

Alhamdulillah telah bergabung juga melalui virtual Pak Bachrudin Nasori. Beliau anggota dari Fraksi PKB dari Dapil Jawa Tengah IX. Tadi hadir juga sebelumnya Pak Bambang Haryadi dari Fraksi Partai Gerindra dari Dapil Jawa Timur IV.

Barangkali sebelum kita beranjak pada diskusi pada para anggota, mungkin pada Pimpinan terlebih dahulu silakan saya berikan kesempatan Pak Marwan Cik Asan untuk memberikan penyampaiannya.

F-D (MARWAN CIK ASAN):

*Bissmillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Ahmad Syaikhu. Saya Marwan Cik Asan A535 dari Fraksi Partai Demokrat Daerah Pemilihan Lampung II. Dipercaya oleh fraksi dan teman-teman sebagai Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Sehingga mengucapkan selamat bergabung pada Pak Muhammad Misbakhun dari Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan berapa ini? Jawa Timur II. Ini baru ada pergantian keanggotaan.

Jadi para narasumber yang saya hormati, Pak Faisal Basri, Bu Enny dan Ibu Ratnayu yang hadir. Pertama kita mengucapkan terima kasih pada pagi hari ini sudah berkenan hadir memberikan masukan kepada BAKN terkait telaahan kami yang membahas subsidi energi, energi listrik, BBM dan gas. Ini sebenarnya tema ini sudah kita angkat dari bulan puasa, cuma mau mengadakan rapatnya bingung. Kita juga tidak bisa bergerak, Bapak-bapak juga tidak bisa bergerak. Kita mau Zoom itu

kurang asyik kayanya. Kita melihat wajah kita sendiri dan muka kita jadi lebih besar padahal kita sudah diet. Jadi akhirnya tertunda-tunda. *Alhamdulillah* pada pagi hari ini bisa kita laksanakan.

Jadi BAKN ini merupakan salah satu Alat Kelengkapan DPR RI yang relatif masih baru ini Bapak-Ibu. Yang baru artinya kan pernah hadir, *off*, kemudian dihadirkan kembali. Jadi memang kegiatannya masih belum terlalu banyak. Pada Masa Sidang yang terdahulu kami sudah menyelesaikan telaahan terkait Dana Otonomi Khusus dan Dana Otonomi Khusus Papua, Papua Barat, Aceh dan Dana Keistimewaan Yogyakarta. Dan pada Masa Sidang ini kita fokus kepada subsidi energi.

Pada intinya adalah kita ingin agar subsidi yang cukup besar ya. Kita ingin melihat ini sebenarnya 3 tahun terakhir ya Pak Syaikhu ya? Dari 2016 ya kalau enggak salah? 3 tahun terakhir ini bagaimana kemanfaatannya kepada rakyat kita terutama apakah subsidi itu sudah tepat sasaran? Paling tidak mengurangi beban hidup masyarakat yang terkait langsung dengan energi, bisa listrik kemudian bahan bakar minyak, kemudian gas. Ini yang ingin kita lihat Pak, efektivitas ini seperti apa? Sudah mencapai belum ini pada apa yang menjadi tujuan kita melakukan subsidi energi ini.

Nah meskipun mungkin kalau kita melihat kondisi hari ini dengan agak sedikit murah nya harga BBM iya mungkin subsidi nya akan jauh lebih berkurang. Tetapi tentu ini 3 tahun, data 3 tahun kemudian masukan dari para narasumber nanti juga dari para pengusaha Migas, Himpunan Pengusaha Migas. Kemudian nanti juga dari para pelaku-pelaku ekonomi masyarakat, UMKM juga kita akan dengar, termasuk dari Pemerintah. Nah ini yang kita nanti akan sinergikan untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait dengan subsidi energi ini.

Kalau pertanyaan spesifik saya belum ada Pak Syaikhu. Nanti mungkin pada sesi berikutnya kami akan mengundang kembali baik itu nanti secara tertulis ataupun kami akan hadirkan kembali Bapak-Ibu pada saat ini nanti akan *closing*. Karena ini kan tahapannya masih panjang. Ini kan baru kita buat *helicopter view* nya seperti apa. Setelah itu nanti kan kita akan bergerak terus ini menjadi semakin mengerucut-mengerucut. Mungkin nanti mengundang semua *stakeholder* terkait dari Pemerintahan. Termasuk nanti kita juga akan undang dari BPK. BPK tadi kan saya baca BPKP juga kita akan undang. Supaya nanti kebijakan-kebijakan subsidi berikutnya terkait energi ini betul-betul efektif. Efektif artinya apa? Membantu meringankan beban rakyat kita terutama pada kebutuhan mereka langsung terkait energi ini.

Hari-hari ini kan PLN itu. Coba kita lihat. Saya lihat di TV itu kan, ada yang kaget-kaget karena tagihannya jadi meledak. Kemudian bagaimana orang yang sebenarnya butuh gas yang tersubsidi ternyata tidak dapat. Sementara yang dapat bisa saling suntik menyuntik. Nah itu contoh-contoh problematika di lapangan. Belum lagi persoalan BBM. Cor-cor minyak itu masih banyak Pak, terutama di daerah yang tidak termonitor. Iya kan? Kemudian yang dia punya kayak onta, begitu ya. Jadi tangkinya bisa dobel-dobel itu kan? Padahal itu kan tidak tepat di situ. Kalau di Jawa mungkin sudah lebih termonitor. Itu kejadian di lapangan. Tapi mungkin ada yang lebih besar dari pada itu nanti yang perlu kita diskusikan.

Saya pikir itu saja Pak Pimpinan. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Ketua BAKN menyampaikan berapa hal kepada kita. berikutnya mungkin Pak Misbakhun ada yang mau disampaikan silakan.

F-P.GOLKAR (H. M. MISBAKHUN, S.E., M.H):

Terima kasih Pak Ketua.

**Pimpinan rapat yang saya hormati.
Narasumber Pak Faisal Basri, Bu Enny dan
Bu Ratnayu yang saya hormati.**

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Sebagai anggota baru di BAKN saya sangat menarik apa yang menjadi topik dan disampaikan oleh Pak Faisal, Bu Enny dan Bu Ratnayu tadi. Subsidi ini memang adalah bisnisnya negara, untuk apa? Urusannya negara, bisnisnya negara untuk bagaimana rakyat mendapatkan komoditas strategis yang dia butuh kan dengan harga yang memadai bagi ukurannya rakyat.

Tetapi dalam proses bisnisnya itu kan tadi disampaikan oleh Pak Faisal Basri apakah kemudian dalam proses itu ada nilai keekonomian? Terus kemudian anggaran negara yang digunakan itu bisa dipertanggung jawabkan dan kemudian siapa yang paling utama mendapatkan manfaat kalau negara melakukan bisnis seperti ini? Karena apa? Tidak semua komoditas-komoditas itu ketika menjadi sebuah barang dagangan ini kan pasti ada pedagang, ada yang *supliernya* dan sebagainya. Negara akan mengambil posisi dimana? dan *treatmentnya* negara terhadap situasi ini apa?

Nah inilah kalau menurut saya ini menjadi paling menarik, karena apa? Ini melibatkan urusan anggaran, melibatkan jumlah anggaran negara yang sangat besar dan kemudian menyangkut sistem dari siklus anggaran itu sendiri. Sistem negara. Bayangkan kita masih mensubsidi energi, kita masih mensubsidi BBM, kita masih mensubsidi sektor pertanian, kita masih ada yang namanya subsidi sektor transportasi dan sebagainya. Belum lagi subsidi yang dinamakan lain di luar nama subsidi itu sendiri.

Nah ini kalau menurut saya karena kita ini akan tidak berbicara tentang *policy* nya, tetapi ketika negara mengambil *policy* itu apakah dijalankan dengan benar? Ketika negara menjalankan *policy*. Tadi contoh sederhananya, apakah kemudian nilai keekonomiannya itu terjadi dan apakah tidak kemudian merusak konstruksi pasar itu sendiri? *Market failure*, terjadi kerusakan pasar. Sementara kita melihat bahwa keseimbangan pasar, pasar yang seimbang dan pembentukannya itu terjadi secara alami, tapi kemudian diintervensi oleh negara, tapi kalau intervensinya itu merusak pasar, tentu yang rugi siapa kita lihat? Dan ternyata rakyat. Rakyat bukannya mendapatkan, rakyat sebenarnya, tujuannya subsidi ini untuk meringankan rakyat, tetapi yang terjadi adalah subsidi ini malah membebani rakyat.

Saya terlalu mengkritik begini Bapak-Ibu sekalian, bahwa negara seperti Indonesia dengan sumber kekayaan alam yang banyak, saya enggak mengatakan

berlimpah. Kita punya gas, kita punya minyak, kita punya batu bara, sebenarnya yang lebih menarik untuk dijadikan daya tarik investasi misalnya, oh energi kita lebih murah, oh BBM kita lebih murah. Sehingga investasi-investasi yang masuk ke Indonesia itu investasi yang mempunyai kualitas. Memperkuat sektor industri dan sebagainya. Bukan karena murah disubsidi.

Contoh, kita selalu mengatakan investasi kita menarik karena apa? Kita *tax heaven*, oh mendapatkan keringanan tarif pajak, atau *tax holiday*. Kenapa enggak kita berikan, oh Indonesia ini penghasil batu bara, harga rata-rata energinya lebih murah. Indonesia penghasil minyak, BBM nya lebih murah. Kalau Anda mau investasi di sektor petrokimia, Anda mau investasi di sektor yang membutuhkan gas yang lebih murah dan sebagainya, Anda akan mendapatkan biaya yang lebih murah dan nilai *competitiveness* nya itu akan lebih efisien dan akan. Nah ini kan yang dimanfaatkan oleh investor yang ada di China.

Kalau kita, kita ini kenapa selalu bersaing dengan negara lain yang tidak mempunyai sumber daya alam sehingga insentif yang diberikan itu adalah dalam bentuk *tax holiday*, tarif pajak yang dibebaskan dan sebagainya. Nah inilah kalau menurut saya kita kehilangan orientasi yang tidak mengangkat nilai keunggulan kita sendiri.

Nah tadi saya setuju yang disampaikan. Ternyata di dalam struktur kita itu terlalu banyak subsidi. Di dalam struktur komoditas-komoditas yang diberikan. Saya tidak ingin menyalahkan, saya justru mengatakan bahwa di saat masyarakat tingkat penghasilannya belum tinggi, sementara barang-barang yang tersedia di pasar belum bisa diakses dengan daya beli, maka masyarakat mendapatkan subsidi itu adalah hanya rakyat. Tapi tinggal bagaimana praktik bisnisnya itu berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan atau tidak? Nah ini yang harus kita perkuat pembicaraan kita di sini.

Contoh tadi yang disampaikan oleh Bang Faisal, Pak Faisal, tadi sangat menarik. Kalau sampai sekitar 2040 defisit energi kita itu menyebabkan negara harus mengekspansi, pembiayaan sampai 80 milyar dolar ini kan menarik. Ini sangat menarik. Karena apa? Kita tidak bisa membangun energi yang *sustain*. Justru kita mengalami defisit yang sangat struktural. Ini karena apa? karena *policy* nya atau praktik yang tidak benar? Atau kombinasi dua itu? Nah kenapa kemudian kalau yang seperti itu tidak ada koreksi terhadap *policy* nya?

Nah tadi seperti Bu Ratnayu sampaikan, ternyata sangat sederhana ketika sampai praktiknya di masyarakat pemasangan meter listrik saja masih disubsidi. Ini kan enggak menarik, begitu. Nah padahal kita mengklasifikasikan energi ini kan subsidi kita itu makin lama makin dikurangi, subsidi kita. Contoh energi yang dulunya memakai listrik 900 watt VA itu kan mendapatkan subsidi. Sekarang sudah tidak, tinggal digeser ke 450. Sampai sekarang PLN pun tidak tahu pelanggan 450 itu jumlahnya berapa. Mereka cuma mengatakan sekitar 30 juta rumah tangga pelanggan.

Nah susahnya di Indonesia ini kalau kita bicara energi, ketika kita bicara energi atau negara (suara tidak jelas) sesuatu, orang berebut-rebut untuk mendapatkan. Contoh, Bantuan Langsung Tunai, tiba-tiba ada orang yang *handphone* nya *smartphone* iya kan? Pada saat mengambil BLT nya itu dandanannya dengan penuh perhiasan emas dan sebagainya. Nah ini kan mengena atau tidak? Walaupun tidak semuanya seperti itu, tapi ada kasus-kasus yang secara spesifik menunjukkan bahwa presisi kita dalam penyaluran subsidi maupun hal-hal yang sifatnya negara memberikan sesuatu kepada rakyatnya sebagai bentuk

subsidi, ini kan sering orang berebut. Tapi giliran suruh bayar pajak, orang mengatakan “saya enggak punya uang”. Ini menarik.

Nah inilah yang harus kita alami. Praktiknya apa? Karena subsidi ini apalagi Pemerintah ini dalam praktik pelaksanaan subsidi BBM, energi, pertanian dan yang lainnya ini kan rekeningnya Pemerintah, ini kan rekening bendahara umum negara. Rekening bendahara umum negara yang melekat pada diri Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara. Contoh sederhananya, saat ini BBM kita tidak disubsidi, yang disubsidi hanya solar dan minyak tanah. Tetapi setiap kali Pertamina mengumumkan perubahan harga pasar BBM itu subsidi Pemerintah selalu bertambah. Ke mana larinya?

Seperti kita ketahui konsumsi terhadap minyak tanah juga sudah sangat kecil, terhadap BBM sudah ditembus dari 2 tempat yaitu B30, B25 dan B30 dan nanti akan. Kemudian yang satunya lagi adalah dari solar itu sendiri. Kan solar ada solar industri yang tidak subsidi dan ada solar. Siapa yang memanfaatkan solar non industri ini? seberapa besar sih solar industri, non industri? Nah tetapi pengeluaran subsidi untuk solar ini kan sangat besar. Apakah sebesar itu konsumsi kita? Nah inilah kalau kita lihat secara *detail* penggunaannya ini yang harus kita perkuat.

Nah terhadap subsidi pertanian juga sama. Terhadap subsidi pupuk. Pertanian ini kan kita gempur dari banyak hal. Kita gempur dari banyak hal untuk apa? Supaya nilai tukar petani kita itu tinggi. Maksudnya itu produk pertanian kita itu bisa kita tekan serendah mungkin sehingga masyarakat mempunyai biaya operasional mulai dari tanam sampai panen itu rendah, sehingga apa? Harga jualnya diharapkan nanti tinggi sehingga nilai tukar petani tinggi.

Tapi apa kalau kita perhatikan sekarang bahwa misalnya pertanian pupuknya sudah kita subsidi. Untuk membuat pupuk selain yang TSP, pupuk urea dan sebagainya, gasnya kita subsidi. Transportasinya kita subsidi lagi, begitu. Harga pupuknya kita subsidi. Bunga pinjaman terhadap mereka kita subsidi. Ini melekat ini semuanya, subsidi semua, begitu.

Nah kemudian apakah ini membuat sektor pertanian kita efisien? Apakah kemudian membuat petani kita menjadi terlepas dari kemiskinan? Apakah petaninya kemudian bisa menyekolahkan anaknya sampai universitas? Itu. Yang saya tahu petani ini bisa menyekolahkan anaknya ke universitas ketika sektor tanah, sektor pertanian mereka sudah menjadi sektor perumahan. Artinya apa? Modalnya dia sudah dijual untuk modal anaknya sekolah, kuliah. Nah ini yang harus kita alami dan ini kalau menurut saya salah satu struktur APBN kita yang paling besar, paling signifikan, dan kalau kita bisa mengatur, mengurai proses subsidi ini dengan benar, saya yakin kita memperbaiki sistem yang signifikan di dalam APBN kita.

Sangat menarik yang disampaikan oleh Pak Faisal Basri ini tadi mengenai disiplin. Disiplin anggaran. Nah kalau kita sendiri dalam praktiknya tidak disiplin anggaran, ya sudah pasti ini, sudah pasti menjadi temuannya BPK. Nah seberapa besar ketidakdisiplinan ini? Karena apa? Ini penggunaan BUN (Bendahara Umum Negara) di dalam sektor subsidi ini paling rentan dan paling signifikan kekuasaannya. Kalau ditotal semua dari sisi subsidi dan sebagainya ini, kewenangan Menteri Keuangan sangat tinggi. Bayangkan dia menguasai rekening yang sangat strategis, sangat besar dan hanya berada di satu orang. Presiden pun tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan uang subsidi ini yang ada di Kementerian Keuangan. Sahabat baiknya Pak Faisal.

Ini yang ingin saya sampaikan. Jadi menurut saya apa yang disampaikan tadi terutama *paper-paper* ini saya akan menjadikan bahan, karena apa? Ada deviasi ini antara konsep *policy* nya kemudian dalam praktik yang terlalu banyak *diadjustment*

ini kan menjadi sebuah penyimpangan kenapa kemudian hasil temuannya, seberapa signifikan kita ingin tahu, begitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Ketua, Pak Pimpinan rapat. Sehingga nanti awal kita ini membongkar masalah subsidi ini menjadi sangat menarik, karena apa?

Coba kalau kita lihat Jepang sektor pertaniannya itu diproteksi sekali. Diproteksi Jepang itu. Beras di Jepang sudah di atas 50.000 sekilo. Tetapi apa yang terjadi di sana? Petaninya makmur. Impor enggak ada yang bisa masuk. Impor enggak bisa masuk. Nah yang terjadi di Indonesia adalah sebaliknya. Nah kita ingin tahu apakah ini bagian dari strategi besar, sebuah agenda besar bangsa kita ini memperlemah dirinya sendiri atau memang ikut agendanya negara lain supaya kita dijadikan pasar? Kalau memperlemah dirinya sendiri ya silakan, tapi kan kita enggak mau. Kalau bagian dari strategi negara lain untuk menginfiltrasi kita, membuat bangsa kita lemah ya mari kita bertarung.

Nah inilah kalau menurut saya ini harus menjadi substansi kita di DPR karena peran BAKN ini luar biasa ini Pak, nanti kalau keluar rekomendasi mengenai subsidi. Tinggal nanti kita bicarakan seberapa kuat nilai rekomendasi kita membahas masalah subsidi. Terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Misbakhun telah menyampaikan banyak hal terkait dengan subsidi ini. Saya kira itu akan menjadi poin-poin yang nanti akan kita lebih dalam ke depan terkait dengan subsidi energi ini. Telah bergabung juga bersama kita *alhamdulillah* Pak Agung Rai Wakil Ketua BAKN dari Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Bali.]

Barangkali kita berikan kesempatan pada Pak Agung kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan silakan. Sebentar Pak. Iya oke silakan.

F-PDIP (I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, SE, MM):

(suara tidak jelas)

Subsidi energi ini. Kami sangat berbahagia bisa (suara tidak jelas) mendengarkan, walaupun terlambat. Namun ini sangat penting sekali terhadap energi kita di dalam negeri ini. Karena ada batasnya energi kita (suara tidak jelas) di dalam negeri kita. Tentunya kita di BAKN ini harus bisa mengkritisi sejauh mana energi-energi yang kita gunakan selama ini untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia kita dan tentunya apakah tadi seperti apa yang disampaikan Pak Misbakhun ini, kita jangan meniru tapi bagaimana kita punya jati diri kita.

Apa yang kita bisa gunakan terhadap energi ini. Apakah kita bisa gunakan yang baik, artinya mempergunakan seefisien mungkin. Apakah juga bisa kita pergunakan tanpa adanya ekspor. Nah ini kita perlu lebih jauh mungkin kita Pimpinan dan anggota untuk bisa mencermati lebih ini, mencermati atas masukan-masukan yang disampaikan pada siang hari ini untuk bagaimana kita bisa menindaklanjuti agar kita bisa, tidak terlalu sering mengimpor (suara tidak jelas) sehingga lebih besar biaya subsidi dari pada APBN dan mengarah ke sana. Bagaimana kita bisa mengurangi ke depannya. Tentunya kita harus bersama-sama melakukan efisiensi.

Nah saya tidak bisa banyak. Nanti kita akan coba mungkin dalam suasana yang lebih bagus, kita bisa suasana yang telah Covid ini bisa berlalu, kita bersama-sama mengkritisi pedomanlah apa yang menjadi akan, apa yang menjadi kepentingan untuk bangsa dan negara kita. Dan ini sangat penting bagi kita jangan sampai fosil, fosil-fosil yang sudah kita punya kemudian habis.

Saya kira itu Pak Ketua, Pak Ahmad Syaikh. Kami persilakan mungkin ada anggota yang lain untuk cermati karena ini sebagai bahan pertimbangan kita untuk melangkah atau kita telaah lebih lanjut lagi. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Agung.

Di samping saya sebenarnya ada Pak Ketua ini Pak Agung.

F-PDIP (I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, SE, MM):

Iya Pak Ketua memang senang sembunyi.

KETUA RAPAT:

Oke, kapan tadi Pak Ketua tanyakan kapan Pak Agung mau ke Jakarta katanya. Mudah-mudahan bisa secepatnya lah dalam suasana yang lebih baik Pak Agung ya.

Baik, berikutnya silakan Pak Bachrudin Nasori kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan.

F-PKB (H. BACHRUDIN NASORI, S.SI, M.M):

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

**Pimpinan serta anggota BAKN yang saya hormati.
Khususnya buat pendatang baru Pak Misbakhun,
selamat datang kawan lama saya.**

tentunya dengan kehadiran Pak Misbakhun di BAKN ini akan membawa BAKN lebih disegani lagi oleh para (suara tidak jelas) yang lain.

Para narasumber yang saya hormati.

Saya mohon maaf tidak mengikuti dari awal (suara tidak jelas).

Saya hanya ingin menanyakan sedikit saja yang menjadi keresahan (suara tidak jelas). Nah apa sih Pemerintah menurut para narasumber ini? (suara tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Pak Bachrudin, mohon maaf Pak Bachrudin, Pak Bachrudin ada *headset* enggak Pak Bachrudin? Suaranya kurang jelas terdengar di sini.

F-PKB (H. BACHRUDIN NASORI, S.SI, M.M):

Kurang dekat ini kayaknya.

KETUA RAPAT:

Wah iya betul, kurang dekat.

F-PKB (H. BACHRUDIN NASORI, S.SI, M.M):

Iya kita tak dekat tak sayang rupanya.

Jadi begitu barangkali yang ingin saya mendapatkan masukan dari para pengamat maupun para narasumber ini. Apa sih masalahnya? Kenapa Pemerintah yang hari ini mendapat keuntungan karena rendahnya, turunnya harga minyak dunia. Kemudian tetap rakyat mengambil keuntungan yang besar. Itu saja barangkali yang sedikit saya (suara tidak jelas). Terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Bachrudin.

Sedikit dari saya Pak tambahan beberapa hal. Tadi saya bisa menyimpulkan dari apa yang dipaparkan oleh Pak Faisal dan Bu Enny saya kira mengerucut pada hal yang sama yaitu masalah tegakan aturan. Kalau Bu Enny tadi implementasi aturan. Mungkin saya ingin tanyakan saja sebetulnya. Kalau dari sisi prioritas-prioritas dari aturan-aturan yang kiranya perlu segera untuk direvisi, barangkali ada catatan-catatan khusus dari Bapak dan Ibu apa kira-kira yang harus segera dilakukan berbagai aturan dan apa yang harus segera diimplementasikan dari aturan-aturan yang tadi disebutkan itu.

Kemudian yang kedua pada Bu Ratnayu. Saya kira ini kalau Ibu menyoroti terkait dengan pengawasan memang ya. Menurut catatan saya ini memang dari 2017 sampai 2019 pun temuan-temuan juga terkait kasus subsidi energi ini semakin tahun bukan semakin berkurang tapi semakin bertambah. Tahun 2017 itu ada 187 kasus tapi tahun 2018 nya enggak bisa ditekan malah tambah 260 kasus. Tahun 2019 malah bertambah lagi jadi 404 kasus.

Jadi ini memang kaitan dengan pengawasan yang lemah sehingga dampaknya juga akan nampak di lapangan betapa kuota dari subsidi ini melampaui dari target yang ditetapkan. Nah tentu ini tidak kita inginkan ke depan sehingga *tools-tools* apa yang kira-kira nanti akan bisa dimanfaatkan oleh kita untuk mengendalikan berbagai subsidi yang akan diberikan dengan tepat sasaran tadi.

Saya kira itu beberapa hal yang mungkin kami dari Pimpinan dan anggota ingin sampaikan kepada para narasumber. Mohon kiranya bisa ditanggapi. Mungkin pertama Pak Faisal silakan.

NARASUMBER (FAISAL BASRI S.E., M.A):

Terima kasih Pak Pimpinan.

Yang mendesak untuk dilakukan adalah kalau saya bukan mengubah aturan, tapi silakan dibuat aturan tapi aturan itu dilaksanakan secara konsisten, begitu. Jangan bikin aturan dilanggar sendiri, begitu. Jadi contohnya waktu itu sekali tiga bulan dievaluasi harga BBM itu, lantas diubah sekali sebulan. Tapi sekarang tidak dievaluasi-evaluasi. Tapi jawabannya akan tetap kami evaluasi, tapi kami tidak naikkan evaluasinya kan tidak menaikkan. Padahal kan evaluasi itu sebetulnya menghitung kembali rumus harga BBM yang sudah ada formulanya, begitu.

Jadi yang ini yang membuat dunia usaha menjadi tidak jelas, efeknya ke Pertamina, Pertamina terganggu likuiditasnya, kemudian mereka harus hutang, hutangnya jatuh tempo bisa bermasalah karena adanya masalah likuiditas. Contohnya di PLN Pak Ketua. PLN secara pembukuan bagus, untung, begitu. Kalau untung kan bagi-bagi tantief, kemudian karena apa? Karena piutang negara sudah dianggap sebagai pendapatan, padahal belum. Nah kalau untung seolah-olah tidak ada masalah, padahal secara *cash flow* negatif, begitu. Karena tunggakan Pemerintah ini.

Nah oleh karena itulah *concern* BAKN ini menjadi semakin mendesak karena justru BAKN ini menjadi semacam kekuatan yang membawa kembali praktik-praktik yang di luar rel kembali ke relnya, begitu. Mungkin salah satu filosofis dari adanya BAKN ini itu, begitu. Jadi luar biasa sebetulnya peranan Bapak dan Ibu walaupun barangkali unitnya masih sangat kecil ya, tidak didukung oleh salah satu staf. Ini kan harus luar biasa pasukan yang Bapak miliki untuk melihat segala sesuatunya dengan terkait satu sama lain.

Nah kemudian yang Pak Misbakhun katakan tadi itu. Jadi subsidi nya itu bukan *double counting* lagi, *multiple counting*. Jadi produk ini misalnya produk pupuk, ini disubsidi tapi di dalam ini kan ada ongkos transportasinya disubsidi juga. Ada macam-macam disubsidi juga. Jadi *multiple counting* yang oleh karena itu ada satu kekuatan lain yang memperolehnya.

Nah yang Bapak-Ibu harus cermati pula, ini ada bagi saya, saya terus terang saja lah akal-akalan. Jadi ada satu manuver dari bisnis besar untuk mengolah batu bara jadi metanol. Itu minta subsidi lagi itu. Seperti biofuel. Biofuel pun dapat, metanol enggak. Kan itu tujuannya sama. Tujuannya adalah untuk, bahkan minta proyek dia dimasukkan sebagai proyek strategis nasional. Nah pengolahan batu bara menjadi metanol ini enggak lebih dari 25% produksinya ya kecil jadinya. Nah yang 34nya (suara tidak jelas) terus, begitu. Supaya izinnnya diperpanjang. Konsesi yang sudah habis otomatis diperpanjang dan Bapak-Ibu sudah *goalkan* dengan Undang-Undang Minerba itu. Jadi tambah lama tambah *ngeri* saya. Masuk lagi nanti post subsidi baru lagi. Subsidi energi lagi namanya dan sebagainya.

Nah yang bahaya lagi yang tadi saya lupa sampaikan. Kan Pertamina dibebankan luar biasa beban Pertamina. Bahkan sebelumnya Pertamina diminta untuk membeli 2 pesawat jumbo untuk tol udara yang membuat Direktur Keuangan Pertamina Arif Budiman minta mundur karena harus persetujuan dia. Syukur saya dengar dari teman-teman Pertamina yang baru sudah dibatalkan proyeknya. Jadi tol udara Pertamina dibebankan. Itu sumber skandal syukur kita masih dilindungi. Jadi prototipe pesawat tempur, eh pesawat logistik tentara untuk perang itu *dimodify*. Sudah yang lain-lain sudah diminta untuk menjadi pelanggannya. Satu harga rumah sakit tadi macam-macam. Kalau menolak kan pasti diganti Bapak-Ibu sekalian.

Jadi iya siap Pak, siap Pak. Tapi di belakang, ini Dirut Pertamina sendiri cerita ke saya, bukan yang sekarang. Saya mohon tidak menyebutkan siapanya. Enggak enak saja, begitu. Pak ini beban kami berat Pak. Kami minta kompensasi Pak ke Presiden. Minta kompensasi loh, wajar kan? Karena bebannya terlalu berat.

Akhirnya kompensasinya apa? Semua ladang minyak yang habis kontraknya otomatis diserahkan ke Pertamina, begitu. Jadi enggak transparan lagi, tidak ada tender lagi, tidak ada *signature bonus*nya, gimana-gimana, begitu kan.

Jadi negara kehilangan kesempatan untuk dapat pendapatan yang terbaik lewat tender, karena otomatis dikasih ke Pertamina. Jadi satu masalah menimbulkan beragam masalah. Nah kita ingin Badan Akuntabilitas Keuangan Negara ini menyelesaikan masalah, selesai sudah. Masalahnya hilang bukan bertambah, terima kasih.

(suara tidak jelas)

KETUA RAPAT:

Sudah Pak ya? Silakan Bu Enny.

NARASUMBER (Dr. ENNY SRIHARTATI, M.A.):

Baik Pak Ketua, terima kasih.

Jadi pertama kita kembali untuk karena ini Badan Akuntabilitas Anggaran, mungkin yang utama, yang pertama dan utama mesti dihasilkan nanti dari kajian, mungkin bukan kajian namanya ya, *review* dari kebijakan energi ini adalah bagaimana akuntabilitas subsidi selama ini. Jadi betul tadi yang disampaikan Pak Misbakhun bahwa banyak sekali jenis subsidi yang dianggarkan di dalam APBN kita tetapi pertanyaan mendasarnya adalah seberapa dari besaran subsidi tadi yang benar-benar dinikmati oleh yang seharusnya mendapatkan, berhak mendapatkan subsidi.

Jadi seperti subsidi tadi disebutkan bibit, pupuk, semuanya untuk petani disubsidi, tapi petani enggak menikmati subsidi itu. Yang menikmati semuanya adalah pupuk (suara tidak jelas) dan sebagainya. Nah termasuk juga di BBM ini. jadi selama ini apakah subsidi ini benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan? Jadi nanti titik fokus dari transparansi anggarannya itu ukuran salah satu indikatornya menurut saya itu.

Nah yang kedua adalah juga akuntabilitasnya dari mana? Akuntabilitas untuk subsidi ini adalah seberapa nanti ada progres menuju menghasilkan suatu kebijakan energi yang efisien? Jadi menuju tercapainya pemenuhan energi yang efisien. Jadi dari panjangnya waktu Pemerintah mengeluarkan subsidi ini, ada enggak progres-progres untuk menghasilkan energi yang benar-benar efisien. Tapi kalau kita mengeluarkan banyak sekali subsidi tetapi justru kontraproduktif, kontraproduktifnya di antaranya tadi justru menimbulkan ketergantungan impor dan sebagainya dan akses masyarakat untuk mendapatkan energi yang efisien ini tidak terpenuhi, otomatis akuntabilitasnya ini sangat minim.

Nah ketiga menurut saya adalah *good will*nya. Jadi setelah ini *next* nya ada enggak *good will* yang benar-benar ingin ada satu keseriusan untuk mengimplementasikan berbagai regulasi yang sudah ada. Jadi seperti tadi sebenarnya secara *regulatory*, secara ke berkomitmen yang tercantum di dalam regulasi Pemerintah ini saya *list* kan minimal, ini kan tidak semuanya. Dari 7 yang kami sampaikan di *paper* ini sebenarnya ada satu komitmen untuk menuju energi yang lebih efisien. Artinya mendorong terlahirnya energi-energi alternatif dan sebagainya. Nah ini tinggal bagaimana ke depan implementasinya.

Saya kira itu yang paling utama Pak Ketua. Jadi apakah dibutuhkan satu regulasi yang baru mungkin. Pertama, mungkin saya dua hal. Pertama yang sudah ditetapkan ini diimplementasikan dan yang kedua adalah teman-teman nanti Tenaga Ahli BAKN bisa mereview kira-kira regulasi-regulasi mana saja yang itu menghambat komitmen tadi. Jadi kan ini ada dua hal. Satu sisi ada komitmen yang bagus, *good will* yang bagus. Tapi *good will* yang bagus itu dianulir oleh adanya regulasi-regulasi yang akhirnya menjadikan ini tidak terpenuhi. Seperti tadi, bagaimana *trading* aturan-aturan *trading* di gas dan sebagainya. Ini kan banyak sekali dan di BBM juga demikian. Di listrik juga demikian. Tadi di antaranya yang disampaikan oleh Bu Ayu tadi.

Jadi dua hal itu secara regulasi menurut saya sudah akan cukup menjawab untuk tadi secara transparansi dan akuntabilitas dari kebijakan energi ini. Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Bu Enny. *Alhamdulillah* selamat datang pada Pak Sugeng Suparwoto, anggota 373 dari Fraksi Partai Nasdem. Beliau juga sekaligus sebagai Ketua Komisi VII yang *Insyallah* juga banyak membidangi energi. Beliau berasal dari Dapil Jawa Tengah VIII.

Baik kita lanjutkan pada Bu Ratnayu barangkali masukan-masukan.

NARASUMBER (Dr. Ir. RATNAYU SITARESMI, MT.):

Baik terima kasih. Mungkin dari saya itu selain dari pengawasan yang harus tetap dilaksanakan dengan serius dan sungguh-sungguh. Itu kuncinya karena semua ini setiap lini sepertinya ada kebocoran-kebocoran yang kita tidak kehendaki. Cuma di sisi lain juga *sustainable energy* itu harus diikuti dengan inovasi *industrial technology*. Maksudnya adalah kalau misalnya memang ada alternatif energi ini digalakkan sesuai dengan Ibu Enny tadi menyebutkan bahwa mohon Pemerintah itu lebih serius, begitu dengan memajukan alternatif energi baik itu fosil maupun *renewable*. Fosil seperti (suara tidak jelas) atau (suara tidak jelas) itu sebenarnya dari Lemigas sudah mengadakan penelitian sampai setahun kalau enggak salah, tapi dihentikan penelitiannya. Jadi karena tidak dibiayai lagi.

Jadi sepertinya itu setengah-setengah saja. Jadi *shell gas* di Sumatera itu dicoba untuk memproduksi. Terus ternyata enggak berhasil. Iya sudah setelah itu harusnya ada penelitian lanjutan, begitu. Jadi tidak berhenti hanya sepertinya itu tidak mau lepas dari Migas yang sudah konvensional. Padahal an konvensional banyak Pak. Jadi seperti misalnya kita itu sosialisasi mengenai biogas. Biogas itu dari limbah-limbah tanaman, limbah apa pun begitu kan. Bisa menjadi alternatif energi menggantikan LPG dan kompor gas itu bisa sebetulnya. Cuma dorongan-dorongan dan sosialisasi kepada masyarakat ini juga harus dilakukan dan itu kan sangat dengan lingkungan kan maksudnya lingkungan itu juga jadi bersih karena limbah diolah kembali, kemudian dimanfaatkan menjadi energi seperti di rumah-rumah tangga.

Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Ibu Ayu yang sudah menambahkan penjelasan-penjasannya.

Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian,

Saya kira demikianlah. Oh iya, mohon maaf Pak Sugeng barangkali silakan Pak.

F-P. NASDEM (SUGENG SUPARWOTO):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

**Selamat siang narasumber bang Faisal Basri.
Mbak Enny dan mbak Ayu.**

Saya mohon maaf terlambat Pimpinan, karena barusan ini juga belum selesai saya tinggal. Lagi RDP dengan PLN. Apalagi kalau Pak Faisal Basri diminta bicara PLN dengan berbagai *problemnya* ini panjang lebar. Sudah kan? Sebetulnya (suara tidak jelas).

Jadi iya tadi itu ini nanti sesi lain lah dari sisi hutang dan sebagainya sudah super. Lagi-lagi ini nanti bisa menjadi bahan kajian kita bahwa memang BUMN yang juga menjalankan fungsi PSO itu yang berat juga. Harus ada cara penelaahannya harus memang spesifik. PSO PLN misalnya, hari ini punya piutang terhadap Pemerintah tahun 2018 saja itu 23 triliun, 2019 25 triliun plus hari ini yang gratis itu yang 450 ampere dan 50% 900 watt ampere bersubsidi itu secara akumulatif dan diperpanjang lagi akumulatif itu menjadi 32 triliun. Jadi 48 triliun tambah 32 triliun. Belum biaya operasi yang dan seterusnya. Ini saya kira satu aspek yang nanti kita menjadi bahan kajian di BAKN.

Saya mau menggaris bawahi beberapa tadi yang secara eksplisit disampaikan mbak Enny juga tentang tadi juga disahut mbak Ayu tentang kebocoran subsidi energi. Memang kita harus menciptakan mekanisme subsidi yang tepat sasaran istilahnya pasti. Subsidi hari ini memang menjadi tidak tepat sasaran menimbulkan kemungkinan-kemungkinan penyimpangan itu tinggi sekali. Tentang subsidi kan pada dasarnya diarahkan kepada masyarakat miskin. Aneh bin ajaib angka-angka kemiskinan turun tetapi subsidi secara volume naik terus.

Misalnya subsidi gas 3 kg. Kan itu impor itu Pak semuanya. Impor itu 3 tahun lalu itu masih 5,2 juta ton setahun. Hari ini 7,4 juta ton selama 2 tahun naik kurang lebih berapa. Nah artinya apa? Ini kan juga pasti terjadi. Apakah angka kemiskinan turun itu kan idealnya subsidinya semakin turun. Ini ada juga Komisi XI soal APBN. Dan sebagainya itu sebagai contoh. Maka kami Komisi VII dan itu di Komisi VII adalah melansir metode subsidi tertutup

Tadi karena menyangkut akurasi data pasti data akurat. Siapa yang menyubsidi dengan subsidi tertutup. Maksudnya tidak seperti hari ini bahwa gas 3 kg memang betul itu ada semacam regionisasi. Satu region, satu kabupaten misalnya angka rumah tangga miskin berapa maka ekuivalen berapa, setiap bulan membutuhkan gas 3 kg. Maka ada ketemu angka misalnya sebuah kabupaten memerlukan 120.000 tabung misalnya begitu. Itu karena dengan perhitungan 1

bulan rata-ratanya 3 tabung plus 1, jadi 4 tabung. Artinya kalau 120.000 tabung itu dibagi 4 itulah 30an ribu kepala keluarga miskin di kabupaten itu. Ini hitungan-hitungan kasarnya kurang lebih metode itu.

Tetapi siapa yang menjamin bahwa itu lantas betul sampai di situ kenapa? Karena memang sekarang siapa pun boleh membeli tabung 3 kg, terlebih dipasarkan di Indomaret, di POM bensin, di mana-mana dan seterusnya. Jadi subsidi secara keseluruhan tolong dikoreksi ini, ada kurang lebih 152 triliun yakni adalah listrik, gas, minyak, bensin, energi, energi saja. Kurang lebih 152 triliun di APBN tahun 2020 ya. Itu totalnya sekian, yang terdiri dari untuk, solar itu disubsidi 1 liternya adalah 1000. Memang sekarang mengalami penurunan dari sisi impor yang cukup signifikan dengan B20, B30.

Hanya saja ada *problem* lagi di B20, B30 ketika harga aktual anjlok turun, kan begitu lantas sebagaimana kita dengar, ini kan juga menghantam di sektor hulu, industri hulu. Harga *crude* anjlok, demikian juga *problem* di *crude palm oil* nya sebagai bahan baku B20, B30. Sehingga bahkan Pemerintah diminta mengucurkan kurang lebih, saya mohon maaf dikoreksi kalau enggak salah sampai 3,6 triliun kurang lebih. Karena terjadinya selisih harga.

Apa yang mau kita garis bawahi di dalam konteks subsidi, kita memang harus menciptakan mekanisme yang bisa menjamin tepat sasaran. Demikian juga di solar yang disubsidi setiap liter 1000. Aneh bin ajaib dan itu sudah menjadi pengetahuan umum. Di daerah-daerah pertambangan itu pasti selalu kurang. Artinya apa? Terjadi penyimpangan yang luar biasa. Memang dari sisi pengawasan di hilir itu ada namanya BPH Migas itu Badan Hilir, itu yang memantau dan sebagainya-sebagainya. Tetapi tetap saja sehingga tetap tidak tepat sasaran. Sehingga fenomena antri solar berhari-hari itu panjang tetapi volume di situ sudah habis. Karena apa? Terjadi penyimpangan karena dijual di industri saja setiap liternya sudah selisih 1000 perak.

Nah saya kira bung Faisal Basri tahulah, ketika ekonomi itu tidak menemukan dinamika pasar yang sempurna, yang terjadi adalah pasti terjadinya *fraud* di mana-mana. Nah ini fungsi DPR, fungsi BAKN, fungsi kita semua saya kira harus terus menerus menciptakan mekanisme bagaimana subsidi itu sampai tepat sasaran. Karena memang betul subsidi diperlukan salah satu afirmatif *policy* bagi masyarakat-masyarakat yang sudah barang tentu memerlukan "kehadiran negara", sehingga tidak bisa dilepas dalam mekanisme pasar bebas yang itu dengan hukum-hukum besi ekonominya. Sehingga perlu kehadiran negara dalam bentuk subsidi.

Tetapi lagi-lagi kalau kita kuantisir tingkat keberhasilan subsidi di *range* misalnya dari angka 1-10, menurut saya tingkat idealisasi subsidi itu tidak lebih dari angka 6 kalau dikatakan. Penyimpangan masih sangat besar juga di subsidi dalam mekanisme penyimpangan tersebut.

Hal lain tadi tentang perlunya energi alternatif (suara tidak jelas). betul. Saya kira kita tidak hidup di ruang hampa dengan DPR yang meratifikasi *Paris Agreement* dengan berbagai syarat-syarat kualitatif dalam konteks lingkungan yang ini adalah (suara tidak jelas) emisi karbon, itu mau tidak mau. Memang ada kebijakan bauran energi sampai tahun 2025 mencapai 23% Energi Baru Terbarukan. Tapi berat mencapai di situ. Persis sebagaimana menjadi keluhan tadi yang dilakukan oleh Lemigas, karena mendapat perlawanan oleh energi fosil juga.

Bang Faisal pasti tahu lah, saya barusan mengesahkan Undang-Undang Minerba. Meskipun isu di luarnya kaya apa, saya bisa buktikan bahwa saya tidak mengerjakan apa yang dikhawatirkan orang, misalnya apa. Undang-Undang Minerba seolah-olah memberi ini, memberi itu, memastikan perpanjangan,

memastikan luas wilayah yang sekarang dikuasai, dikuasai kembali. Saya katakan tidak. Ini nanti ada sesi lain. Ini kan menjadi isu publik. Tetapi sama sekali tidak. Justru.

Tapi itu faktanya misalnya sekarang batu bara yang dalam posisi (suara tidak jelas) bisnis itu melakukan berbagai upaya kecuali bagi pengelola batu bara yang memang punya kesadaran untuk mencapai, menjadi alternatif apa yakni dengan DME, kan begitu. Jadi dari (suara tidak jelas) bahkan batu bara yang rendah bisa diubah menjadi gas DME yang senyawanya kurang lebih sama dengan LPG yang menjadi bahan 3 kg gas hari ini yang kita hari ini masih impor 7,2 juta ton setiap tahun, itu *increase* saya katakan tadi.

Naik justru kan, fenomena unik. Padahal subsidi ini adalah dialamatkan untuk masyarakat miskin, kenapa malah gasnya *nambah* impornya? Padahal kan angka-angka kemiskinan kan bahkan menjadi 1 digit misalnya salah satu keberhasilan Pemerintah Jokowi 9 koma sekian persen saja. Nah inilah yang maka menjadi benar kalau BAKN kita sama-sama telusuri subsidi ini di mana? Apa terjadi deviasi di mana, bahkan nanti bisa kita kuantisir dan juga aspek-aspek kualitatif kita terus pahami.

Nah energi fosil juga kita menghadapi *problem*. Kenapa dengan anjloknya harga minyak dunia bisnis di usaha hulu anjlok ini Pak. *Lifting* minyak dipastikan anjlok. Nah besok SKK Migas kebetulan mau paparan. Paling banter paling *lifting* itu kalau diperkirakan ya 600 an ribu barel saja. Kenapa? Iya memang margin ini menjadi kecil. Margin-margin di situ. Nah lantas di saat yang kaya begitu, saya masih merefer, menggaris bawahi perlunya energi-energi alternatif.

Fosil tetap menarik di gas, karena memang secara volume gas kita memang besar, besar sekali. Sekarang yang sedang *dirunch* adalah tangguh tren 3 yang secara total 1-2-3 itu mencakup 14,3 TCF (Trillion Cubic Feet) yang itu sebetulnya untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tetapi kan yang tangguh 1-2 itu terlanjur dijual. Kenapa ketika *mendevlop* sebuah bidang usaha pertambangan kan harus sudah ada *offtaker* dalam jangka waktu sekian waktu dan sebagainya ketika Pemerintahan Bu Mega Wati kan Tangguh tren 1, tren 3. Sudah terlanjur dijual ke China dan Jepang. Ya tidak salah juga, karena kalau tidak ada pembelinya waktu itu sampai kapan pun tidak akan bisa dibangun. Itu kan karakter bisnis hulu. Nah sekarang sedang dibangun tren 3 yang untuk memenuhi kebutuhan.

Kenapa? Kelangkaan gas bisa akan segera menimpa tahun 2021 kalau tidak ada langkah-langkah. Salah satunya yang dirumuskan Komisi VII yang itu harus kita awasi juga, namanya DMO (Domestic Market Obligation). Jatah Pemerintah yang sekarang diekspor tadi, di gas itu 70-30. 70 milik Pemerintah, 30 milik kontraktor. Beda kalau di minyak. Minyak yang dengan PSC (Production Sharing Contract) itu 85-15 Pak. Tetapi setelah *cost recovery*, kan begitu. Kalau sekarang ketika Jonan dirumuskan tidak *cost recovery*, tapi *grow split* dan sebagainya-sebagaimana. Nanti ada sesi lain.

Berat ini kita dari sisi energi ke depan. Maka menjadi penting bagaimana memastikan yang namanya afirmatif *policy* dalam konteks subsidi harus tepat sasaran. Karena *resources* ekonominya juga sedang menghadapi *problem* tentang energi. Jadi itu istilahnya lantas dimakan Bapak mati, tidak dimakan Ibu (suara tidak jelas) hari ini soal energi. Soal energi yang anjlok harganya itu yang memukul juga pendapatan negara. Karena di sisi energi itu kita di Migas masih namanya PNBB yang sejumlah 336 triliun kalau tidak salah ini mohon koreksi angkanya ya. 100 an triliun itu adalah dari Migas tadi yang ekspor tadi yang 80-30. Nah sementara beberapa waktu lalu Keppres No. 40 tahun 2016 mensyaratkan harga gas di *well*

plan atau di tingkat pabrik untuk beberapa produk tertentu yang perlu juga mendapat perlindungan hanya 6 dolar per MMBTU misalnya. Nah ini juga memerlukan penyesuaian-penyesuaian dan sebagainya.

Apa yang mau kita garis bawahi di sini dengan sumber energi yang semakin berat ini baik menjadi sumber pendapatan negara maupun kita sebagai penggerak ekonomi rakyat, saya kira saya dengan sangat setuju kita terus mengawasi subsidi. Itulah intinya yang mau saya kemukakan. Dari apa yang saya pahami di Komisi VII, nah hari ini dengan PLN, bisa SKK Migas dan Pertamina dan seterusnya. Memang kita menghadapi *problem-problem* berat dari sisi pendapatan maupun dari sisi bagaimana energi menjadi penggerak urat-urat nadi kehidupan masyarakat.

Saya kira sebagaimana mungkin *basic* (suara tidak jelas) kan sudah terkoreksi kalau ada sandang, pangan, papan. Nah sekarang sandang, pangan, energi, kesehatan dan seterusnya-seterusnya. Energy sudah menjadi *basic* bagaimana juga sudah berkembang, berkomunikasi, *lessure* dan sebagainya sekarang dan seterusnya.

Saya kira itu Pimpinan. Mohon maaf saya sekali lagi mohon maaf atas tidak nyambungannya mungkin. Tetapi mungkin nanti kita akan memfokuskan bagaimana kita menyimak, kita meneliti tentang subsidi-subsidi yang *mix match* dan sebagainya. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Sugeng Suparwoto sudah menekankan tadi berapa perlunya mekanisme subsidi yang tepat sasaran dan juga *Inshaallah* ini baru tahapan awal para narasumber terkait dengan BAKN ini yang penelaahan kesempatan ke depan ini terkait dengan subsidi energi. Jadi bisa jadi nanti dalam kesempatan ke depan kita akan bisa bertemu lagi untuk melakukan pendalaman-pendalaman.

Terima kasih atas segala kehadirannya dan juga tadi harapan-harapan besar terhadap BAKN mudah-mudahan *Inshaallah* ini juga akan bisa kami lakukan sebaik-baiknya sehingga kita BAKN ini bisa memberikan kontribusi besar dalam perjalanan bangsa ini. Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq

Pada Pak Bachrudin, Pak Agung Rai, juga terima kasih atas kesertaannya di dalam pertemuan ini. Juga para Pimpinan dan anggota BAKN yang terhormat. Kurang lebih saya mohon maaf.

Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.30)